BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal adalah dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)” . Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan

yang tidak berlabel halal adalah keterbatasan sumber daya LPPOM MUI Sumatera Barat, kurangnya kesadaran masyarakat, keterlibatan pihak lain, kurangnya regulasi yang jelas, keterbatasan teknologi yang ada di LPPOM MUI Sumatera Barat, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain.

- 3) Bentuk upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sosialisasi kepada para konsumen untuk lebih teliti memilih produk makanan yang bersertifikat halal MUI. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut, memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, mengimbau masyarakat muslim agar menghindari mengkonsumsi produk makanan impor yang tidak berlabel halal, melakukan survei lapangan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bila mendapati makanan impor yang tidak berlabel halal. Tidak adanya kesadaran dari konsumen sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan impor yang tidak berlabel halal.

B. SARAN

- 1) Kepada pihak LPPOM MUI Sumatera Barat untuk sering mengadakan sosialisasi baik kepada Pelaku Usaha agar tetap patuh sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sosialisasi kepada konsumen agar konsumen dapat cerdas dalam memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi.
- 2) Kepada Produsen Pelaku Usaha selaku penjual barang/jasa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam artian jujur dalam memberikan jaminan barang yang dijual terkait dengan label halal. Tidak untuk mementingkan untung semata saja tetapi paham dengan regulasi yang ada terkait label halal.
- 3) Kepada konsumen untuk dapat cerdas dalam memilih dan mengonsumsi produk yang dibeli.